



Alamat: Jl. Sagu No.47, Ragunan, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12620

E-mail: partisipasiperempuan@gmail.com

Fb: Lembaga Partisipasi Perempuan

IG: @lembagapartisipasiperempuan

PERNYATAAN SIKAP LEMBAGA PARTISIPASI PEREMPUAN ATAS BPFA+30 MINISTERIAL CONFERENCE, 19-21 NOVEMBER, UNCC BANGKOK

Meskipun tidak hadir dalam BPFA tahun 1995, Lembaga Partisipasi Perempuan bersama dengan jaringan GPPI (Gerakan Perempuan Peduli Indonesia) cukup bangga dapat hadir dalam tiga kali peringatan BPFA +20, BPFA + 25 dan BPFA+30 regional Asia Pasifik, dimana setiap lima tahun peringatan BPFA tersebut selalu memiliki tantangan tersendiri. Pada BPFA+20 tantangan yg terjadi adalah ketua DELRI menolak terminologi LGBTIQ, SRHR, comprehensive sexual education & various form of the family. Yang kemudian berlanjut hingga konferensi Commission on the status of women di New York. Di KBRI kami menanyakan persoalan itu dan dijawab staf Kemenlu bahwa kelompok agama tidak mau.

Kami lalu menyimpulkan bahwa hidup matinya perempuan Indonesia ditentukan oleh kelompok agama. Padahal mandat BPFA & CSW adalah CEDAW dan seluruh instrumen HAM Perempuan.

Hingga saat ini BPFA+30 tantangan tersebut masih tetap sama. Meski tidak secara langsung menolak namun menghindari isu-isu yang sensitif seperti SRHR, LGBTIQ dan Interseksionalitas.

Adapun statement dari pemerintah Indonesia yg dibacakan oleh Direktur HAM, Kemenlu RI sangatlah normatif dan tidak menggambarkan realita sesungguhnya.

Menyebutkan pelanggaran HAM berat di Gaza juga tidak perlu mengingat di Indonesia sendiri persoalan pelanggaran HAM masa lalu belum ada yang terselesaikan dan kekerasan terhadap perempuan meningkat tiap tahun.

Representasi 22 persen perempuan di parlemen bukanlah merupakan capaian karena hingga saat ini Indonesia belum pernah mencapai 30 persen akibatnya sulit memperjuangkan RUU yang responsif gender seperti RUU PPRT yg sudah 20 tahun blm kunjung disahkan.

Statement RI kedua yg disampaikan oleh Eko Novi (Asdep PUG KPPPA) menyebutkan bahwa pemerintah akan bekerja sama dengan pihak swasta untuk pemberdayaan ekonomi perempuan. Persoalannya adalah pihak swasta yang dimaksud apakah benar-benar bukan pelanggar instrumen bisnis dan HAM. Jika benar yang dimaksud misalnya PT Sinar Mas ini



Alamat: Jl. Sagu No.47, Ragunan, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12620

E-mail: partisipasiperempuan@gmail.com

Fb: Lembaga Partisipasi Perempuan

IG: @lembagapartisipasiperempuan

sangat dipertanyakan apakah mereka tidak merusak lingkungan hidup, melindungi HAM masyarakat lokal & masyarakat adat, pekerja perempuan dan lainnya.

KPPPA perlu memastikan bahwa ada mekanisme di KPPPA untuk memastikan perusahaan-perusahaan tersebut tidak melakukan pelanggaran HAM masyarakat atas kesehatan, tidak melanggar HAM perempuan dan seluruh instrumen HAM sesuai prinsip PBB ttg bisnis & HAM.

Side event yang melibatkan narasumber Indonesia juga terkait topik-topik yang "soft" seperti pemberdayaan ekonomi dan topik anti korupsi namun tidak ada yang mengangkat isu urgent seperti aborsi aman, LGBT maupun tema-tema HKSR lainnya.

UN WOMEN perlu mengawal komitmen negara untuk BPFA dan CEDAW dan mendukung CSO yang memantau implementasi instrumen HAM perempuan dan mengorganisasi side event dengan tema-tema urgent seperti situasi HKSR di Indonesia.

Narahubung LP2

Adriana Venny & Budi Wahyuni

HP : 0856.1090.619

https://search.app?link=https%3A%2F%2Fwww.kompas.id%2Fartikel%2Fimplementasi-plaform-aksi-beijing-selaras-dengan-visi-asta-cita-hapus-diskriminasi-perempuan&utm_campaign=aga&utm_source=agsadl2%2Csh%2Fx%2Fgs%2Fm2%2F4



Alamat: Jl. Sagu No.47, Ragunan, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12620

E-mail: partisipasiperempuan@gmail.com

Fb: Lembaga Partisipasi Perempuan

IG: @lembagapartisipasiperempuan

Foto-foto kegiatan :





Alamat: Jl. Sagu No.47, Ragunan, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12620

E-mail: partisipasiperempuan@gmail.com

Fb: Lembaga Partisipasi Perempuan

IG: @lembagapartisipasiperempuan

